



**BAPPEDA
KUTIM**

RENCANA STRATEGIS

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Timur

2025–2029

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Alhamdulillah, kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai time schedule yang direncanakan. Renstra Bappeda ini merupakan penjabaran lebih lanjut substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2025-2029, sebagai pedoman operasional dalam menjalankan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Renstra Bappeda tersebut disusun sebagai rencana kerja dan pernyataan teknis yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, untuk itu masing-masing satuan kerja perlu menyiapkan rencana detailnya. Kami berharap dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 ini dapat berguna untuk peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya Renstra Bappeda ini, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhir kata, semoga bermanfaat bagi semua. Amiin.

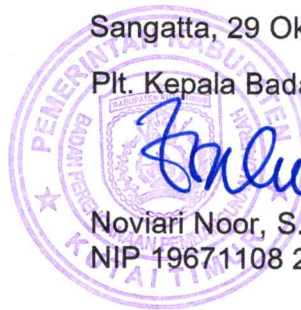
Sangatta, 29 Oktober 2025

Plt. Kepala Badan,



Noviani Noor, S.T., M.T.

NIP 19671108 200212 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-11
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-17
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	II-27
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-33
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II-33
2.2.2. Isu Strategis	II-34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029	III-2
3.3 Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-22029	III-5
3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029	III-11
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Uraian Program	IV-1
4.2. Uraian Kegiatan	IV-2
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	IV-14

- | | | |
|-----|---|-------|
| 4.4 | Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas pembangunan Daerah | IV-43 |
| 4.5 | Target Keberhasilan Pencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda | IV-47 |
| 4.6 | Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) | IV-48 |

BAB V PENUTUP **V-1**

- | | | |
|------|---------------------------------------|-----|
| 5.1. | Kesimpulan Penting Substansial | V-1 |
| 5.2. | Kaidah Pelaksanaan | V-2 |
| 5.3 | Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi | V-2 |

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Analisis Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II-12
Tabel 2.3 Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	II-13
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	II-19
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	II-21
Tabel 2.6 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023-2024	II-22
Tabel 2.7 Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024	II-29
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	II-33
Tabel 2.9 Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	II-36
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	III-4
Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029	III-5
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029	III-12
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	IV-4
Tabel 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026-2030	IV-15
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-43
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	IV-48
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	IV-50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan	I-2
Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra.....	I-3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	II-2
Gambar 2.2 Profil Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II-11
Gambar 2.3 Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II-16
Gambar 3.1 Konsep Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur	III-3
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur ...	IV-3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

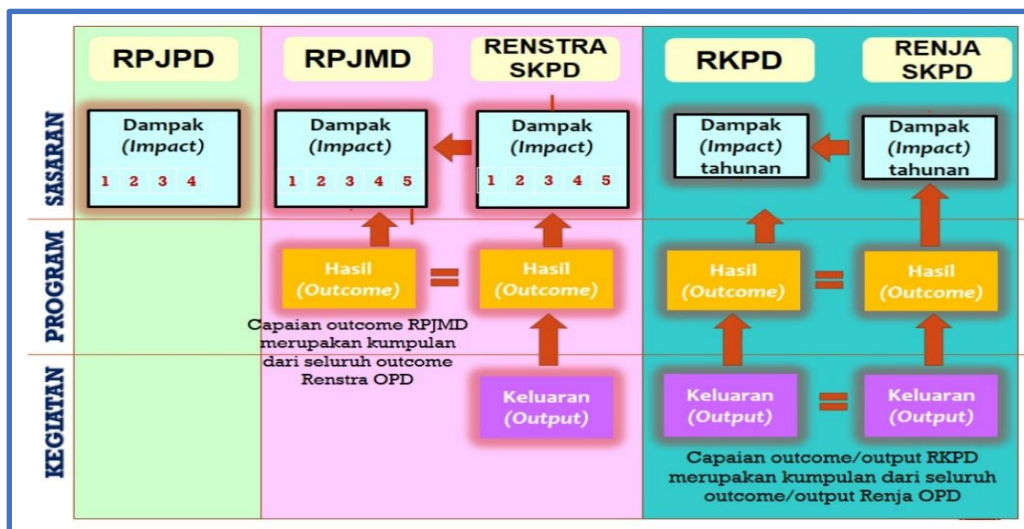
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 15 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sejalan dengan penyusunan RPJMD tersebut, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diwajibkan menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk periode yang sama, yaitu tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan RPJMD secara lebih operasional dan sistematis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen ini memuat visi dan misi kepala daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan, lengkap dengan target indikator kinerja serta pagu indikatif selama kurun waktu lima tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam urusan perencanaan pembangunan daerah, berkewajiban menyusun Renstra yang menjabarkan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan yang bersifat makro, strategis, dan komprehensif. Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 tidak hanya bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, tetapi juga disusun dengan memperhatikan berbagai tantangan, permasalahan, dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, khususnya terkait dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Melalui penyusunan Renstra ini, diharapkan proses perencanaan

pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal, menghasilkan program dan kegiatan yang tepat sasaran, efisien dalam pelaksanaan, ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

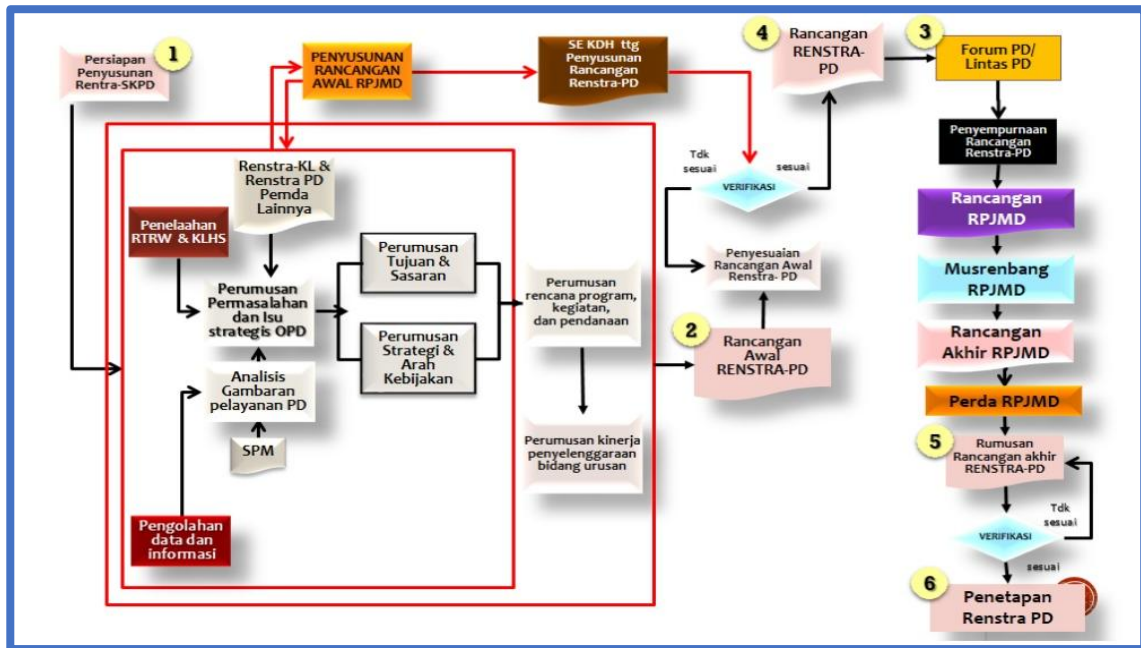
Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengutamakan pendekatan teknokratis melalui prinsip-prinsip perencanaan yang strategis, berbasis logic model (kerangka logis), sistematis, dan dinamis. Pendekatan ini memastikan bahwa perencanaan yang disusun tidak hanya realistis dan terukur, tetapi juga adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Untuk lebih jelas keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat di lihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Keterkaitan Kinerja Antar Dokumen Perencanaan



Dalam proses penyusunannya terdapat beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, penyusunan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan, dan penetapan, seperti dijelaskan sebagaimana dijelaskan pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra



1.1. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ke Tiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;

14. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Bappeda dan stake holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Kutai Timur secara berkesinambungan, perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung visi dan misi Kabupaten Kutai Timur.

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menetapkan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama lima tahun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Timur guna mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, dengan berlandaskan pada dokumen RPJMD;
2. Menyediakan indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Timur, serta sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen tahunan perangkat daerah;
4. Memperkuat pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang perencanaan, guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

1.3. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;
- 3.2. Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029;
- 3.3. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025-2029;
- 3.4. Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program;
- 4.2. Uraian Kegiatan;
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda; dan
- 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan Penting Substansial;
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan;
- 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

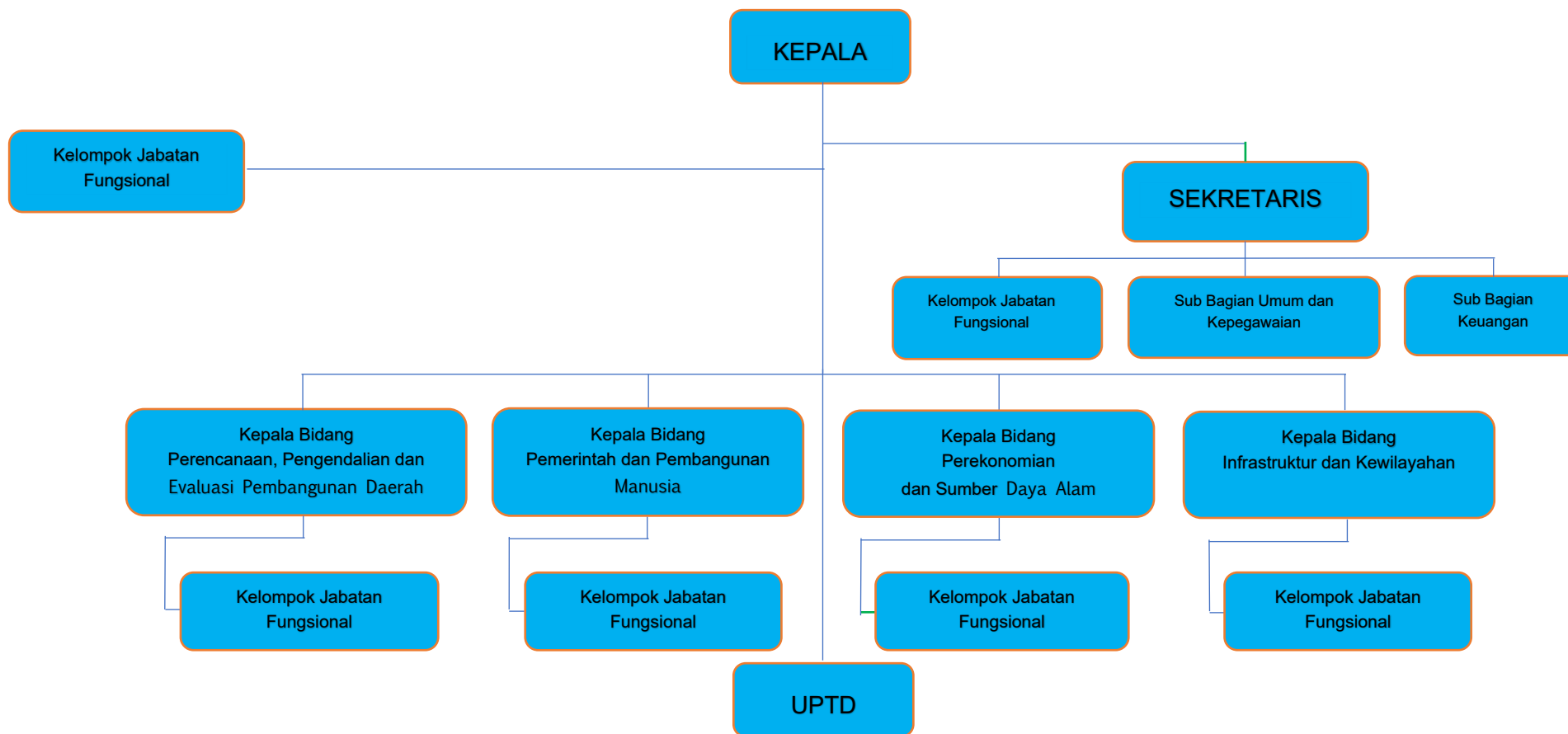
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sejalan dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi secara nasional dalam struktur birokrasi pemerintahan, Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi dan pengalihan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, lincah dan dinamis. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap Struktur Organisasi Perangkat Daerah termasuk struktur organisasi Bappeda. Adapun struktur organisasi Bappeda hasil dari penyederhanaan birokrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris membawahi 2 (Dua) Kepala Sub Bagian terdiri dari: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan. Secara rinci susunan organisasi Bappeda sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ;
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam ;
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.1 Pada bagan struktur organisasi tersebut menunjukkan hubungan kerja antar satuan kerja eselon.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur



Tugas dan Fungsi Jabatan di Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda

- (1) Kepala Bappeda mempunyai tugas pokok Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi;
 - a. Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Merencanakan bahan kebijakan pembangunan Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Mengkoordinasikan penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai bahan utama Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
 - e. Mengkoordinasikan penghimpunan dan penganalisisan hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - f. Merencanakan penyusunan evaluasi rencana pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD;
 - g. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - h. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - j. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan;
 - k. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan lingkup bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - l. Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan Bappeda;

- m. Membina kelompok jabatan fungsional;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- o. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- p. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- q. Melakukan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur dilingkungan Badan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan tugas :
 - a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Daerah; dan
 - d. Pengelolaan urusan ASN.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian kegiatan di Bappeda;
 - b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Bappeda;
 - c. Pengoordinasian dan pelaksanaan Musrenbang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah pada Bappeda;
 - e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Bappeda;
 - f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Bappeda;

- i. Menghimpun, mengelola, dan menyajikan data/informasi berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja Bappeda; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi :
 - a. Persuratan;
 - b. Tata usaha;
 - c. Kearsipan;
 - d. Administrasi ASN;
 - e. Perlengkapan;
 - f. Rumah tangga; dan
 - g. Penataan barang milik Daerah.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;
 - j. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan;

- k. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
 - l. Pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
 - m. Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
 - n. Pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - o. Pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
 - p. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - b. Penatausahaan; dan
 - c. Akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
 - f. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
 - g. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - i. Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi;
 - a. Melakukan Analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - b. Melakukan Analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - f. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
 - h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
 - k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. Menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - n. Mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan

7. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Perumusan kebijakan dalam bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan dalam bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten/kota;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - f. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - j. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten;
 - k. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten;
 - l. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
 - m. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten.

8. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
 - c. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - g. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten;
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten;
 - i. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

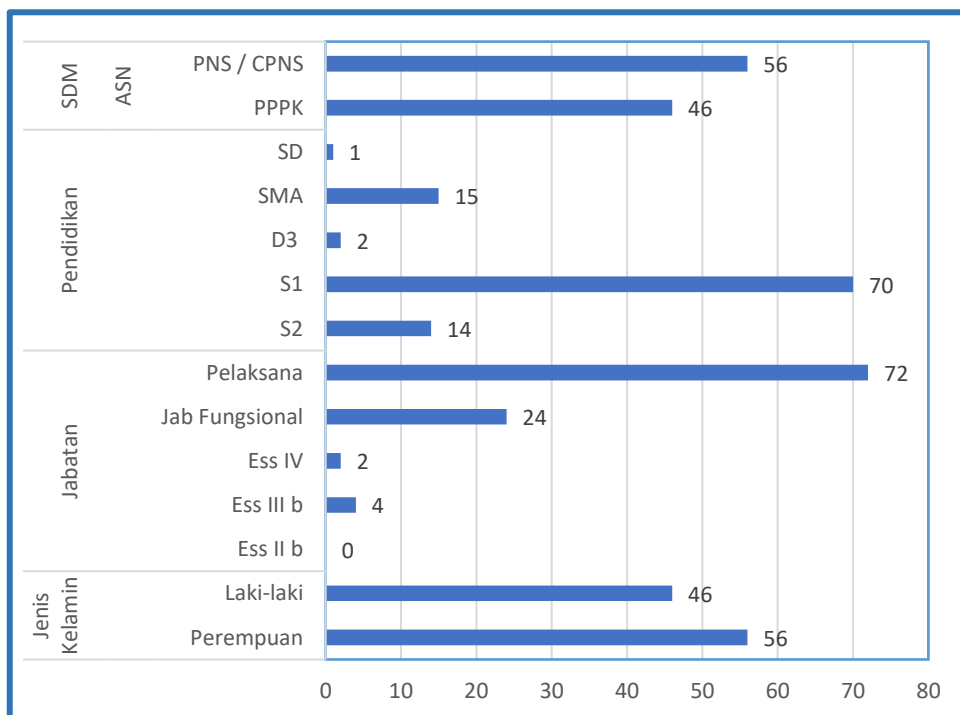
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

4. Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
5. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Perangkat Daerah terdiri atas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya sarana prasarana. SDM merupakan elemen terpenting bagi Perangkat Daerah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bappeda kabupaten Kutai Timur memiliki tugas dan fungsi dibidang perencanaan, dalam memberikan pelayanan yang baik Bappeda di dukung SDM sebanyak 102 orang. Profil SDM Bappeda disajikan pada Gambar 2.2.

**Gambar 2.2 Profil Sumber Daya Manusia (SDM)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**



Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Bappeda, Oktober 2025

Tabel 2.2 Analisis Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	NAMA JABATAN	ABK	BEZZETING		
			PNS	PPPK	+/-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	0	0	-1
2	PERENCANA AHLI UTAMA	1	0	0	-1
3	PERENCANA AHLI MADYA	9	0	0	-9
4	SEKRETARIS BADAN	1	0	0	-1
5	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1	1	0	0
6	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	1	1	0	0
7	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	1	1	0	0
8	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	1	1	0	0
9	KEPALA SUB BAGIAN UMUKI DAN KEPEGAWAIAN	1	1	0	0
10	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	1	1	0	0
11	PERENCANA AHLI MUDA	15	12	0	-3
12	PERENCANA AHLI PERTAMA	22	3	5	-14
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	1	0	0	-1
14	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	1	0	0	-1
15	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	1	0	0
16	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	38	28	0	-10
17	PENATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	1	0	0	-1
18	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	1	0	0	-1
19	PENATA LAKSANA BARANG MAHIR	1	0	0	-1
20	PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA	1	0	0	-1
21	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	0	0	-1
22	ARSIPARIS TERAMPIL	1	0	1	0
23	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	0	0	-1
24	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	15	3	12	0
25	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	3	1	0	-2
26	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	28	0	27	-1
27	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	1	0	0
28	STATISTISI AHLI PERTAMA	1	0	1	0
29	STATISTISI AHLI MUDA	1	0	0	-1
30	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	3	1	0	-2
	JUMLAH	155	56	46	-53

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Bappeda, Oktober 2025

Tabel 2.3 Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

NO	TAHUN	IP ASN	
		KABUPATEN KUTAI TIMUR	BAPPEDA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2023	78 (Sedang)	77 (Sedang)
2	2024	75 (Sedang)	74 (Sedang)

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2025

Berdasarkan profil SDM Bappeda, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di Bappeda dan IP ASN kondisi ketersediaan sumber daya manusia menunjukkan gambaran sebagai berikut :

- a. Dilihat dari komposisi jenis kepegawaian, terdapat 56 orang berstatus PNS (55%) dan 46 orang berstatus PPPK (45%). Komposisi ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK telah selesai dilaksanakan. Keberadaan PPPK yang mencapai 45% dari total aparatur menandakan upaya serius dalam pengisian formasi dengan harapan membawa dampak terhadap perbaikan kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan.
- b. Dari aspek kualifikasi pendidikan, SDM yang berpendidikan SD-SMA sebanyak 16 orang (16%), D3 sebanyak 2 orang (2%), S1 sebanyak 70 orang (68%), dan S2 sebanyak 14 orang (14%). Komposisi ini mengindikasikan bahwa 82% aparatur memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1, yang menjadi modal dasar kuat untuk menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah;
- c. Untuk jabatan struktural, dari kebutuhan delapan orang telah terisi enam orang dengan dua posisi Kepala Badan dan Sekretaris masih kosong, menunjukkan tingkat pengisian sebesar 75,00%. Pada jabatan fungsional terdapat kesenjangan signifikan dimana dari total kebutuhan 62 orang, baru terisi 24 orang dengan 38 posisi kosong atau tingkat pengisian hanya 38,7%. Sementara untuk kategori pelaksana menunjukkan kondisi lebih baik dengan 73 dari 85 kebutuhan telah terisi atau tingkat pengisian 85,9% dengan 12 posisi kosong. Secara keseluruhan, dari total kebutuhan 155 orang, saat ini terisi 102 orang atau tingkat pengisian 65,80% dengan kekurangan 53 orang;
- d. Berdasarkan jenis kelamin ASN Bappeda terdiri dari laki-laki sebanyak 46 orang (45%) dan perempuan sebanyak 56 (55%), data menunjukkan komposisi yang cukup seimbang, bahkan sedikit lebih banyak perempuan. Ini merupakan indikator positif yang menunjukkan adanya kesetaraan gender, yaitu tidak ada hambatan

sistematis bagi perempuan untuk menjadi ASN di Bappeda. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi, tidak terdapat diskriminasi yang berkaitan dengan perbedaan suku, agama, dan ras.

- e. Data Indeks Profesionalitas (IP) ASN, menunjukkan bahwa IP ASN Bappeda berada di bawah IP ASN Kabupaten Kutai Timur. Pada tahun 2023, IP ASN Bappeda tercatat 77, sementara IP ASN kabupaten berada pada angka 78. Demikian pula pada tahun 2024, IP ASN Bappeda turun menjadi 74, sedangkan IP ASN kabupaten tercatat 75. Posisi Bappeda berada di bawah rata-rata kabupaten menunjukkan adanya kesenjangan profesionalitas yang perlu mendapat perhatian khusus. Bappeda sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam perencanaan pembangunan masih perlu melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan profesionalitas ASN, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda di bidang perencanaan pembangunan secara profesional.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah aparatur yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi Bappeda, dengan catatan pengelolaan manajemen ASN dilaksanakan dengan baik dan optimal. Kesimpulan ini didasarkan pada pertimbangan :

- a. Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K yang telah tuntas;
- b. Kualifikasi pendidikan dengan 82% berpendidikan minimal S1 menunjukkan potensi kapasitas intelektual yang memadai untuk melaksanakan fungsi perencanaan yang memerlukan kemampuan analisis dan berpikir strategis;
- c. Rata-rata pengisian jabatan struktural dan pelaksana yang sudah mencapai 80.25% menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan dan operasional organisasi sudah cukup baik;
- d. Kesetaraan gender dan tidak adanya diskriminasi perbedaan suku, agama dan ras menjadi modal sosial yang kuat bagi Bappeda dalam memberikan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan secara optimal;

Kedepan untuk mewujudkan optimalisasi SDM yang ada, diperlukan beberapa pengelolaan manajemen ASN yang sistematis dan terukur, yaitu :

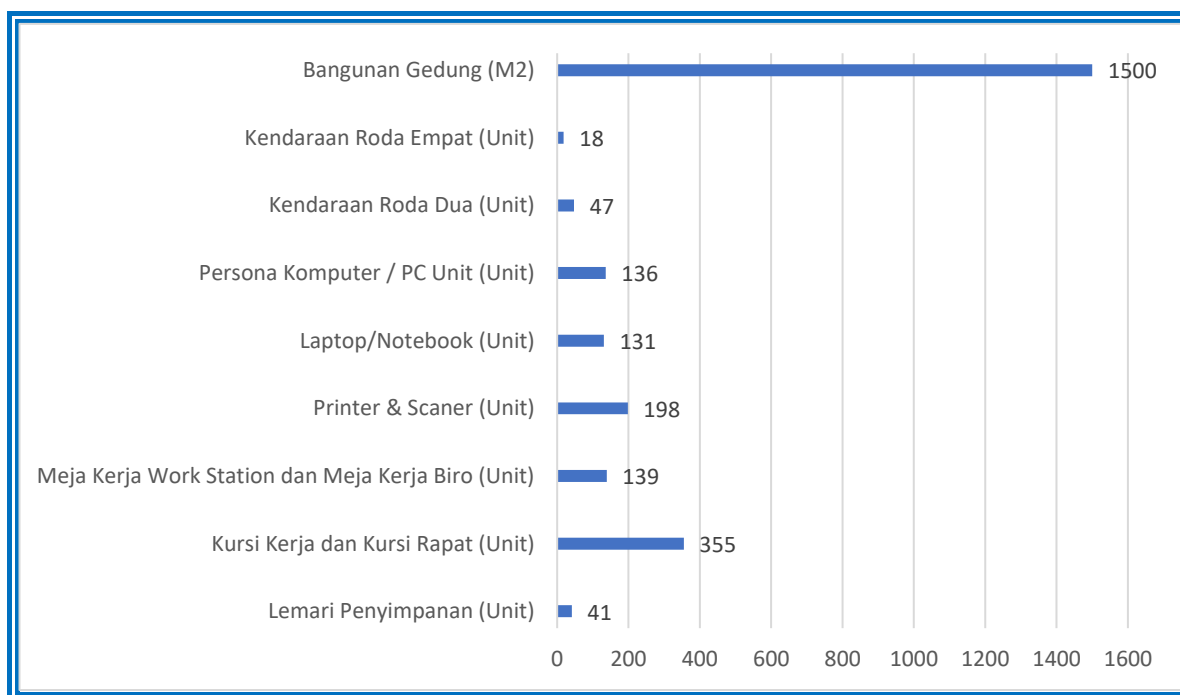
- a. Menerapkan manajemen kinerja berbasis hasil melalui penyusunan SKP yang terukur dan realistis, implementasi reward and punishment yang konsisten, serta

- evaluasi beban kerja berkala untuk memastikan distribusi tugas yang merata dan adil;
- b. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk dapat mendorong peningkatan IP ASN Bappeda pada tahun-tahun mendatang yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda di bidang perencanaan pembangunan secara profesional
 - c. Mengimplementasikan program peningkatan kompetensi berkelanjutan meliputi mentoring dan coaching untuk transfer knowledge, diklat teknis perencanaan, upgrading pendidikan ke jenjang lebih tinggi bagi pegawai berkinerja baik;
 - d. Melakukan redistribusi dan restrukturisasi PNS jabatan pelaksana yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai menjadi jabatan fungsional untuk mengisi kekosongan 38 posisi, melalui jalur uji kompetensi fungsional sesuai regulasi kepegawaian atau rekrutmen CPNS;
 - e. Pembentukan tim atau kelompok kerja untuk pekerjaan spesifik dengan melibatkan personel dari berbagai bidang sesuai kebutuhan;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sistem kerja untuk meningkatkan produktivitas;

Dengan penerapan manajemen ASN tersebut secara konsisten dan terukur, jumlah 104 aparatur yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mencapai kinerja organisasi maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

Selain SDM, sarana prasana juga merupakan bagian penting dalam mendukung mewujudkan pelayanan Bappeda. Sarana prasarana Bappeda disajikan pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Bappeda, Oktober 2025

Sarana prasarana Bappeda secara umum memiliki kondisi yang cukup memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi perencanaan, di mana luasan gedung telah mencukupi meskipun beberapa ruangan memerlukan perbaikan, terutama ruang rapat yang menjadi prioritas mengingat intensitas penggunaannya yang tinggi untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah sehingga memerlukan perlengkapan modern dan representative dan beberapa ruangan memerlukan perbaikan. Dalam pencatatan aset di mana peralatan laptop/notebook dan personal komputer/PC total tercatat sebanyak 267 unit dengan rincian kondisi baik sebanyak 160 unit dan rusak 107 unit dimana total laptop/notebook dan PC kondisi baik sebanyak 160 unit jumlah ini melebihi jumlah ASN dan kendaraan dinas yang berjumlah 65 unit dengan 6 unit sudah tidak dapat dioperasikan namun belum dilakukan pelepasan atau penghapusan aset, sementara untuk sarana pendukung lainnya telah mencukupi kebutuhan operasional saat ini.

Pencatatan aset Bappeda menjadi salah satu faktor penting sebagai dasar perencanaan pengadaan barang, pelaksanaan pengadaan barang, dan penyusunan sistem pemeliharaan serta monitoring aset secara berkala, sehingga pengadaan

barang di Bappeda sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan asas urgensi, efisien (tidak kekurangan dan tidak berlebih) dan kewajaran.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari kualitas birokrasi pemerintah. Bappeda Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah melayani berbagai stakeholder dari berbagai elemen, baik itu Perangkat Daerah, DPRD, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan lainnya.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda menerapkan prinsip pentahelix yang melibatkan lima unsur yaitu Pemerintah (Government), Akademisi (Academy), Bisnis (Business), Komunitas/Masyarakat (Community), dan Media, sehingga dapat mewujudkan sinergitas dan kolaborasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda selama periode 2021-2024 merupakan hasil dari pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dan Renja Bappeda. Pencapaian kinerja Bappeda tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana (aset), maupun dukungan anggaran yang memadai dalam rangka implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai target dan sasaran berdasarkan RPJMD 2021-2026.

Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dilakukan dengan mengukur capaian target kinerja sasaran dan program untuk mendapatkan rumusan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra Bappeda periode 2025-2029. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2024 disajikan pada Tabel 2.1. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan dan dalam upaya pencapaian target kinerja Bappeda tahun 2021-2024 didukung dengan ketersediaan anggaran. Kinerja keuangan Bappeda tahun 2021-2024 disajikan pada tabel 2.4.

Tabel. 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA BAPPEDA TAHUN				REALISASI CAPAIAN TAHUN				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD ke dalam RKPD	%	84,55	85,55	86,55	100		85,55	98,97	99,32		100	114,35	99,32
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Lakip	%	75,00	80,00	85,00	-	84,98	100	100	-	113,31	125,00	117,65	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	%	100	100	100	-	87,35	98,81	100	-	87,35	98,81	100	-
2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	%	80,00	87,00	89,00	100	98,75	100	98,97	99,32	123,44	114,94	111,20	99,32
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	85,55	100	100	98,75	93,75	98,97	99,32	98,75	109,59	98,97	99,32

NO	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA BAPPEDA TAHUN				REALISASI CAPAIAN TAHUN				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	%	83,55	84,55	85,55	100	93,15	100	100	100	111,49	118,27	116,89	100
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD	%	85,55	85,00	100	100	101,01	96,27	100	100	118,07	113,26	100,00	100
II	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik	Nilai Sakip	-	-	-	-	73,00	-	-	-	66	-	-	-	90,41
1	Terwujudnya Tata Kelola Adinistrasi Perkantoran yang Baik	Persentase Capiian Tata Kelola Adinistrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	%	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	%	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
APBD	20.036.939.288	37.130.776.256	47.620.941.573	54.238.171.428	16.459.794.236	27.816.895.691	37.338.593.596	44.799.722.684	82,15	74,92	78,41	82,60	39.756.707.136	31.603.751.552
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	11.588.109.046	39.597.552.512	46.615.115.746	54.515.501.165	10.799.614.595	32.674.334.778	38.567.560.744	43.883.266.621	93,20	82,52	82,74	80,50	38.079.069.617	31.481.194.185
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.356.293.411	39.597.552.512	46.615.115.746	54.515.501.165	2.348.448.995	32.674.334.778	38.567.560.744	43.883.265.621	69,97	82,52	82,74	80,50	36.021.115.709	29.368.402.535
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.092.536.831	6.585.000.000	22.881.757.400	21.659.595.598	3.311.720.666	4.537.572.381	16.333.303.684	18.324.003.618	65,03	68,91	71,38	84,60	14.054.722.457	10.626.650.087

Tabel 2.6 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023-2024

NO	TAHUN	NILAI	
		KABUPATEN KUTAI TIMUR	BAPPEDA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2023	60.24 (B/ Baik)	66 (B/ Baik)
2	2024	60.08 (B/ Baik)	67.5 (B/ Baik)

Sumber : PAN RB dan Inspektorat Kab. Kutai Timur, 2025

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2021–2026 telah mengalami revisi pada tahun 2023 dengan penambahan tujuan strategis "Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik" yang diukur melalui indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Analisis capaian kinerja Bappeda periode 2021–2024 sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1 dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan I : Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD ke dalam RKPD menunjukkan capaian yang konsisten sangat tinggi pada periode 2021-2024, meskipun tahun 2024 belum mencapai target dengan realisasi 99,32%. Untuk sasaran-sasaran di bawah tujuan ini adalah :
 - a. Sasaran I (Meningkatnya Akuntabilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) menunjukkan capaian di atas 100% pada tahun 2021-2023
 - b. Sasaran II (Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah) dengan indikator Persentase Pencapaian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah hanya tahun 2024 yang belum mencapai target (99,32%)
 - c. Sedangkan Sasaran III (Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Perencanaan Daerah) menunjukkan konsistensi penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah di atas 100% pada tahun 2021-2023 dan tepat 100% pada tahun 2024.
2. Tujuan II : Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik
 Tujuan ini baru diukur mulai tahun 2024 dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mencapai 90,41%. Sasaran di bawah tujuan ini yaitu Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran yang Baik

dengan indikator Persentase Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan mencapai 100% pada tahun 2024.

Sedang program pendukung untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bappeda terdiri atas 3 program yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (indikator Persentase capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan) menunjukkan tren peningkatan dari 87,35% (2021) hingga 100% (2023-2024),
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD) menunjukkan fluktuasi dengan capaian 98,75%, 109,59%, 98,97%, dan 99,32%,
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD) secara konsisten mencapai atau melampaui target dengan capaian 118,07%, 113,26%, 100%, dan 100%.

Dalam pelaksanaan Renstra Bappeda terdapat faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

1. Faktor pendukung antara lain :
 - a. Komitmen melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 tepat waktu;
 - b. Koordinasi dan pendampingan kepada seluruh PD dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Melakukan penyelarasan dan sinkronisasi RKPD dengan RPJMD, Renja dengan Restra dan Renja dengan RKPD Kabupaten Kutai Timur;
 - d. Penggunaan aplikasi SIPD untuk tahap perencanaan penganggaran dan aplikasi Evdoren untuk tahap monitoring dan evaluasi;
 - e. Koordinasi intensif dengan TAPD, Kepala Daerah dan DPRD;
 - f. Ketersediaan jumlah SDM di Bappeda yang memadai;
 - g. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan antar PD serta tingkatan pemerintahan.

2. Faktor Penghambat antara lain :
 - a. Penetapan indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dan sebelum perbaikan Renstra tidak terdapat rumus perhitungan capaian target kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) sama dengan indikator program, hal tersebut menyulitkan monitoring dan evaluasi serta menghasilkan pengukuran kinerja yang kurang valid;
 - b. Penentuan besaran target kinerja belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan sebelumnya dan belum sepenuhnya menggunakan data valid dari Satu Data Indonesia Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang belum berbasis kinerja dan tidak dilengkapi dengan bukti fisik/pendukung yang membuat proses monev kurang efektif dan kurang objektif;
 - d. Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang dinamis menuntut adaptasi cepat dari PD dan Bappeda;
 - e. Keterbatasan kompetensi aparatur di bidang perencanaan baik di Bappeda maupun PD mengakibatkan kualitas perencanaan pembangunan yang dihasilkan belum optimal;
 - f. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang belum optimal mengakibatkan belum berjalannya sistem *Money follow* program;
 - g. Padatnya jadwal pada setiap tahapan perencanaan, mengakibatkan kelambatan PD dalam menyerahkan dokumen untuk diverifikasi oleh Bappeda.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renstra dan capaian indikator kinerja , Bappeda mengidentifikasi lima aspek strategis yang menjadi fokus perbaikan dalam perencanaan periode 2025–2029, yaitu :

- a. Penguatan Basis Data Perencanaan dengan cara mengintegrasikan sistem perencanaan dengan Satu Data Indonesia Kabupaten Kutai Timur untuk memastikan perencanaan berbasis data yang valid, akurat, dan terkini;
- b. Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi dengan mengembangkan sistem monev berbasis kinerja yang dilengkapi dengan mekanisme pengumpulan dan verifikasi bukti fisik/pendukung (evidence-based monitoring), menyusun SOP

- monitoring evaluasi, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk dokumentasi dan pelaporan yang lebih efektif;
- c. Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pencapaian target pembangunan;
 - d. Peningkatan integrasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan, khususnya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan PD;
 - e. Optimalisasi Sinkronisasi Perencanaan-Penganggaran dengan memperkuat koordinasi melalui forum koordinasi rutin, menyusun panduan teknis sinkronisasi perencanaan-penganggaran yang jelas untuk mengidentifikasi potensi ketidakselarasan sejak tahap awal perencanaan;
 - f. Penguatan Mekanisme Koordinasi dengan PD, TAPD, DPRD dan kepala daerah yaitu menetapkan timeline yang jelas dan realistis untuk setiap tahapan perencanaan, serta menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong kepatuhan PD dalam penyerahan dokumen tepat waktu;
 - g. Penyempurnaan tata kelola kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah;
 - h. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan melakukan sosialisasi cepat kepada seluruh stakeholder terkait perubahan regulasi yang berdampak pada proses perencanaan.

Sesuai dengan tabel 2.2 Realisasi anggaran Bappeda pada periode 2021-2024 menunjukkan capaian berturut-turut sebesar 82,15%, 74,92%, 78,41%, dan 82,6%, dengan rata-rata realisasi sebesar 79,52%. Capaian realisasi anggaran yang belum optimal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

- a. Sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, sebagian besar alokasi anggaran Bappeda digunakan untuk kegiatan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, koordinasi dengan PD dalam penyusunan dokumen perencanaan, sinkronisasi program dengan kementerian dan provinsi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Namun demikian, pelaksanaan koordinasi yang sebagian

besar bersifat responsif berdasarkan undangan dari PD, provinsi, dan kementerian, serta penyelenggaraan koordinasi secara daring (online) mengakibatkan anggaran yang telah dialokasikan khususnya untuk belanja perjalanan dinas belum dapat direalisasikan secara optimal;

- b. Anggaran belanja modal peralatan.mesin, belanja jasa dan belanja pakai habis yang tidak dapat direalisasikan, berdampak signifikan terhadap penyerapan anggaran secara keseluruhan.

Dari hasil Evaluasi kinerja keuangan 2021-2024 dapat disimpulkan kedepan diperlukan perbaikan antara lain :

- a. Melakukan restrukturisasi alokasi anggaran koordinasi sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan pola koordinasi saat ini;
- b. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Belanja Modal Melakukan pemetaan kebutuhan belanja modal secara komprehensif di awal tahun berdasarkan analisis kondisi sarana prasarana eksisting, rencana pengembangan organisasi, dan perkembangan teknologi yang relevan dengan fungsi perencanaan, menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) belanja modal maksimal satu bulan setelah APBD ditetapkan dengan jadwal pelaksanaan yang realistis dan terdistribusi merata, menggunakan metode pengadaan yang paling efisien seperti e-purchasing untuk barang standar atau konsolidasi pengadaan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses, melakukan pra-kualifikasi atau survey harga pasar sebelum proses pengadaan untuk memastikan spesifikasi teknis dapat dipenuhi dan harga estimasi realistis, serta menetapkan milestone dan monitoring mingguan terhadap progres pelaksanaan pengadaan belanja modal;
- c. Peningkatan Kapasitas Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja melakukan analisis korelasi antara pola belanja dengan capaian kinerja untuk mengidentifikasi komponen belanja yang paling berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis, menyusun perencanaan anggaran berbasis aktivitas lebih detail sehingga alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan riil untuk setiap kegiatan.

Meskipun menghadapi kendala realisasi anggaran, Bappeda tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan secara efektif, yang tercermin dari ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah, menunjukkan bahwa kinerja substantif tidak sepenuhnya bergantung pada tingkat penyerapan anggaran namun lebih pada efektivitas koordinasi dan komitmen organisasi.

Sesuai dengan tabel 2.3. data Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dikeluarkan oleh PAN RB dan inspektorat Kabupaten Kutai Timur, menunjukkan bahwa capaian Bappeda secara konsisten berada di atas rata-rata Kabupaten Kutai Timur dalam dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2023, nilai akuntabilitas Bappeda tercatat 66 dengan predikat B (Baik), melampaui capaian kabupaten yang berada pada angka 60,24 dengan predikat yang sama. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dimana nilai akuntabilitas Bappeda meningkat menjadi 67,5, sementara capaian kabupaten sedikit menurun menjadi 60,08, keduanya masih dalam kategori B (Baik). Selisih yang cukup signifikan antara Bappeda dan rata-rata kabupaten menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja di Bappeda telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Meskipun demikian, untuk mencapai predikat yang lebih tinggi yaitu BB (Sangat Baik) dengan nilai minimal lebih besar dari 70, Bappeda perlu melakukan langkah-langkah strategis ke depan seperti penguatan sistem perencanaan strategis yang berbasis data, peningkatan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala, perbaikan dokumentasi dan pelaporan capaian kinerja, serta penguatan koordinasi antar bidang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi agar dapat terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan memberikan kontribusi optimal dalam fungsi perencanaan pembangunan daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bappeda Kabupaten Kutai Timur memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan mensinergikan perencanaan pembangunan lintas Perangkat

Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Provinsi dan Pusat, peran Bappeda dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koordinator Perencanaan Bappeda mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta memastikan Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah;
2. Fasilitator Sinkronisasi Program dan Kegiatan, Bappeda menjembatani sinergitas, sinkronisasi dan konsistensi program/kegiatan antar perangkat daerah agar tidak tumpang tindih dan saling mendukung, termasuk menyelaraskan dengan prioritas Nasional, Provinsi;
3. Perumus dan Pengarah Kebijakan Pembangunan melalui analisis dan kajian, Bappeda memberikan arahan kebijakan kepada Perangkat Daerah agar perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata;
4. Monitoring dan Evaluasi Bappeda memantau dan mengevaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah secara berkala guna memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.

Dengan peran-peran tersebut, Bappeda menjadi kunci dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Kelompok sasaran layanan Bappeda Kabupaten Kutai Timur adalah para pemangku kepentingan internal Pemerintah Daerah dan mitra strategis pembangunan yang secara langsung menggunakan atau menerima manfaat dari peran Bappeda dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi :

1. Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)
Dalam pengambilan keputusan strategis berbasis dokumen perencanaan dan hasil kajian pembangunan daerah.
2. Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Sebagai pengguna utama dokumen perencanaan dan data hasil evaluasi pembangunan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur
Sebagai mitra dalam pembahasan kebijakan anggaran dan pengawasan pembangunan.
4. Masyarakat Kabupaten Kutai Timur
Terlibat secara tidak langsung melalui proses partisipatif perencanaan dan sebagai penerima manfaat akhir dari arah pembangunan yang ditetapkan.
5. Instansi Vertikal dan Mitra Pembangunan
Sebagai pengguna data, informasi, dan hasil kajian pembangunan daerah dalam sinergi program dan kebijakan lintas sektor.

**Tabel 2.7. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024**

No.	PERAN / FUNGSI BAPPEDA	JUDUL PERJANJIAN KERJASAMA	MITRA KERJASAMA	NOMOR PERJANJIAN KERJASAMA	DURASI PELAKSANAAN	TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						
1.	Perencanaan	Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur Tahun 2021				2021
2.	Perencanaan	Penyusunan Dokumen Rkpd Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022				2021
3.	Perencanaan	Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur Tahun 2022	Pusat Ekonomi & Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia	050/403/Bappeda-P3/I/2023	3 Bulan	2023
4.	Perencanaan	Penyusunan Dokumen Rkpd Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024	Pusat Ekonomi & Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia	050/404/Bappeda-P3/I/2023	6 Bulan	2023

No.	PERAN / FUNGSI BAPPEDA	JUDUL PERJANJIAN KERJASAMA	MITRA KERJASAMA	NOMOR PERJANJIAN KERJASAMA	DURASI PELAKSANAAN	TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Perencanaan	Penyusunan Dokumen Rpjpd Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045	Pusat Ekonomi Dan Bisnis Syariah Feb Universitas Indonesia	809/970/ BAPPEDA-P2EP/ III/2023	9 Bulan	2023
6.	Perencanaan	Penyusunan Dokumen Analisis Potensi Kewilayahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	Perorangan	B-000.3.3/ 2568/BAPPEDA- P2EP	3 Bulan	2023
7.	Perencanaan	Penyusunan Dokumen Rkpd Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	Lembaga Pengkajian Dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia	B-000.3.3/ 568/BAPPEDA KUTAI TIMUR	5 Bulan	2024
8.	Perencanaan	Penyusunan Dokumen Rpjpd Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045	Pusat Ekonomi Dan Bisnis Syariah Feb Universitas Indonesia	B-000.3.3/ 570/BAPPEDA KUTAI TIMUR	8 Bulan	2024
9.	Perencanaan	Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Lkpj) Bupati Kutai Timur Tahun 2023	Pusat Ekonomi & Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia	B-000.3.3/ 566/BAPPEDA KUTAI TIMUR	4 Bulan	2024
10.	Perencanaan	Penyediaan Tenaga Ahli Perorangan Tim Keunggulan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024	Perorangan	B.000.7.2/1643/ BAPPEDA KUTAI TIMUR	7 Bulan	2024
11.	Perencanaan	Penyusunan Dokumen Rpjmd Teknokratik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2030	Lembaga Pengkajian Dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu	B-000.3.3 /2509/BAPPEDA KUTAI TIMUR	5 Bulan	2024

No.	PERAN / FUNGSI BAPPEDA	JUDUL PERJANJIAN KERJASAMA	MITRA KERJASAMA	NOMOR PERJANJIAN KERJASAMA	DURASI PELAKSANAAN	TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Administrasi Universitas Indonesia			
12.	Perencanaan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026	Pusat Pengembangan Kapasitas Dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	B-000.3.3/3997/BAPPEDA-P2EP	2 Bulan	2024
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						
13.		Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024	Team Leader Ir. Gunadi Irianto	B-000.3.3/3630/BAPPEDA-PPM 27 September 2023	4 Bulan (September sd Desember 2023)	2023
14.		Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kemiskinan	CV. RIMBUN KOMPUTINDO	B000.3.3/3418/BAPPEDA-PPM Tanggal 10 November 2023	1 Bulan (10 Desember 2023)	2023
15.		Analisis Capaian Kinerja Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur	Team Leader DR. Ardi, S.Si, M.Si	B-000.3.3/2252/BAPPEDA - PPM	4 (Empat) bulan Juni sd Oktober 2024	2024
16.		Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	Team Leader Lilis Suryani, MM	B-000.3.3/4004/BAPPEDA – PPM Tanggal 17 Oktober 2024	2 bulan (Oktober sd Desember 2024)	2024
17.		Penyusunan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024	Team Leader Ir. Achmad Zaini, M.Si	B-000.3.3/3994/BAPPEDA - PPM Tanggal 17 Oktober 2024	2 (Dua) bulan. Oktober sd Desember Tahun 2024	2024
18.		Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD)	Team Leader Ir. Achmad Zaini, M.Si	B-000.3.3/1373/BAPPEDA – PPM Tanggal 28 April 2025	4 (Empat) April sd Agustus Tahun 2025	2025

No.	PERAN / FUNGSI BAPPEDA	JUDUL PERJANJIAN KERJASAMA	MITRA KERJASAMA	NOMOR PERJANJIAN KERJASAMA	DURASI PELAKSANAAN	TAHUN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025				
19.		Penyusunan Laporan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 - 2029	DR. Ardi,S.Si,M.Si	B -000.3.3/1371/ BAPPEDA - PPM Tanggal 28 April 2025	4 (Empat) April sd Agustus Tahun 2025	2025
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam						
20.	Perencanaan Koordinasi, Monitoring	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Pusat Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Regional dan Pedesaan Universitas Mulawarman			
21.		Kajian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Timur	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman	809/597/ BAPPEDA-EKO/ KPE/III/2022	4 Bulan	
22.		Pemetaan Jalan Usaha Tani Kabupaten Kutai Timur	Pusat Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Regional dan Pedesaan Universitas Mulawarman	809/ 598 / BAPPEDA-EKO/ JUT/III/2022	5 Bulan	
23.		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Kabupaten Kutai Timur	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman	050 /876/ BAPPEDA-EKO/ RAD-TPB/III/2023	4 Bulan	

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Permasalahan perencanaan pembangunan daerah umumnya berkaitan dengan kurangnya sinkronisasi antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, baik di tingkat daerah maupun antara pusat dan daerah. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah lemahnya keterpaduan antar dokumen perencanaan, sehingga sasaran dan program yang dirumuskan tidak sepenuhnya mendukung arah kebijakan daerah. Selain itu, perencanaan sering kali disusun tanpa didukung oleh data yang akurat dan terkini, sehingga keputusan yang diambil tidak berbasis pada kondisi objektif. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penghambat tersusunnya perencanaan yang efektif dan responsif. Permasalahan lainnya adalah tidak konsistennya antara dokumen perencanaan dan penganggaran, yang mengakibatkan banyak program strategis tidak terlaksana secara optimal. Akibatnya, perencanaan menjadi bersifat administratif semata dan belum sepenuhnya menjadi alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Rekomendasi dan temuan hasil monitoring belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah untuk perbaikan perencanaan di periode berikutnya. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola perencanaan, meningkatkan kualitas data, dan membangun sistem perencanaan yang lebih integratif, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan. Dalam mengidentifikasi permasalahan Renstra, Bappeda Kabupaten Kutai Timur mengacu pada permasalahan yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 dan kondisi terkini yang masih terdapat kesenjangan antara realita dan capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan Bappeda disajikan pada table 2.8.

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Masih rendahnya kualitas perencanaan daerah	Kurang optimalnya dukungan data dalam menyusun dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
			Kebijakan perencanaan dari Pemerintah Pusat yang sering berubah
			Hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan berikutnya
			Belum optimalnya perumusan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang spesifik, terukur, dan berorientasi hasil, sehingga menghambat akuntabilitas dan evaluasi
			Kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada perangkat daerah dan Bappeda belum memadai
			Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan teknologi untuk pengendalian serta evaluasi yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran
			Koordinasi dan pendampingan terhadap perangkat daerah yang belum optimal
			Belum optimalnya dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
			Kurangnya publikasi dan sosialisasi dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, pendek dan hasil evaluasi pembangunan sebagai pedoman bagi perangkat daerah
			Belum adanya penjenjangan kinerja dan pembagian peran yang jelas antara pejabat struktural, jabatan fungsional, dan pelaksana
			Belum optimalnya penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) tata kelola untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda

Sumber : RPJMD Kab. Kutai Timur 2025-2029 dan LKJIP Bappeda 2021-2024

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan, tantangan, atau kondisi penting yang secara signifikan memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi perangkat daerah. Isu strategis bersifat prioritas dan mendasar karena dapat berdampak luas terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program

pembangunan serta pencapaian hasil yang diharapkan dalam jangka menengah hingga panjang.

Identifikasi isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap berbagai faktor, baik dari lingkungan internal (seperti kinerja masa lalu, kapasitas organisasi, kelembagaan, SDM, dan anggaran) maupun eksternal (seperti kebijakan nasional, dinamika sosial ekonomi, politik, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat). Selain itu, isu strategis juga dapat diangkat dari hasil monitoring dan evaluasi serta hasil audit kinerja dan rekomendasi pengawasan lainnya.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, isu strategis menjadi landasan utama dalam perumusan strategi, program, dan kegiatan prioritas. Isu-isu ini membantu Bappeda untuk lebih fokus dalam mengatasi akar permasalahan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta merespons perubahan yang terjadi secara adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan Renstra yang berbasis pada isu strategis akan memperkuat arah pembangunan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Dalam merumuskan isu strategis Renstra Bappeda 2025-2029, digunakan kertas kerja sebagaimana telah dimuat dalam Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan:

- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah;
- b. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional);
- c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Berdasarkan hal tersebut, isu strategis Renstra Bappeda diuraikan sebagai berikut

Tabel 2.9 Isu Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PD yang memiliki tugas dan fungsi Koordinasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan, Monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Masih rendahnya kualitas perencanaan daerah	Peningkatan pelayanan Publik dan Kompetensi ASN Peningkatan tata kelola pemerintahan	Agenda pembangunan berkelanjutan global (SDGs Goal 16: Governance and accountability)	Sinergitas Pelaksanaan Astacita terhadap Pembangunan berkelanjutan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	1. Optimalisasi Integrasi dan Sinkronisasi Sistem Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Daerah Berbasis Satu Data Indonesia dan berorientasi kinerja 2. Peningkatan Kompetensi SDM dan Sistem Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Optimalisasi Integrasi dan Sinkronisasi Sistem Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Berbasis Satu Data Indonesia dan berorientasi kinerja.

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas memerlukan sistem yang terintegrasi, sinkron, dan berbasis data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan terukur, namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah masih berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi. Sistem basis data perencanaan belum sepenuhnya dipublikasikan dan terintegrasi antar Perangkat Daerah, sementara sistem monitoring dan evaluasi (monev) juga belum berbasis teknologi real-time sehingga menyulitkan mengetahui capaian kinerja secara komprehensif, ditambah koordinasi monev lintas PD yang belum optimal dan hasil monev yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk dijadikan dasar perencanaan selanjutnya. Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai payung integrasi data pembangunan belum berjalan optimal, padahal SDI merupakan prasyarat penting untuk memastikan data yang digunakan dalam perencanaan bersumber dari satu standar, satu metadata, dan dapat dipertanggungjawabkan serta indikator kinerja tujuan, sasaran, program yang belum terukur dengan jelas (tidak memenuhi kriteria SMART). Permasalahan integrasi dan sinkronisasi sistem ini berdampak signifikan berupa duplikasi data, inkonsistensi informasi antar PD, lambatnya proses pengambilan keputusan berbasis data, ketidakkonsistenan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) baik secara vertikal maupun horizontal. Kondisi ini berpengaruh terhadap pencapaian visi-misi pembangunan daerah, menurunkan efektivitas belanja pembangunan, melemahkan akuntabilitas kinerja, serta menghambat terwujudnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga Optimalisasi Integrasi dan Sinkronisasi Sistem Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Berbasis Satu Data Indonesia dan berorientasi kinerja harus segera ditangani untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah.

2. Peningkatan Kompetensi SDM dan Sistem Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, namun saat ini terdapat kesenjangan antara kapasitas yang dimiliki dengan tuntutan peran strategis Bappeda. Kapasitas SDM dalam teknik perencanaan dan evaluasi masih belum optimal, khususnya dalam penguasaan analisis data, metodologi monitoring dan evaluasi berbasis kinerja. Sistem pembinaan SDM belum terstruktur dengan baik, ditandai oleh pelatihan yang insidental dan tidak berkelanjutan, belum adanya peta kompetensi dan jenjang karir yang jelas untuk setiap aparatur, transfer knowledge yang belum sistematis, budaya kerja yang masih berorientasi pada administrasi daripada substansi dengan pembagian beban kerja yang belum merata. Pada sistem akuntabilitas, sistem monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya terintegrasi serta hasil monev yang belum ditindaklanjuti secara optimal untuk perbaikan perencanaan selanjutnya, koordinasi dengan Perangkat Daerah dan TAPD belum optimal, sistem basis data perencanaan belum terintegrasi antar Perangkat Daerah, hal ini berdampak pada rendahnya kualitas dokumen perencanaan, lemahnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah sehingga diperlukan, peningkatan kompetensi SDM dan Sistem Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Penetapan tujuan dalam Renstra Bappeda selain didasarkan pada potensi, permasalahan dan isu-isu strategis bidang perencanaan, juga mengacu pada rumusan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Misi ke 4 RPJMD **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas**, Tujuan ke 3 **Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif**, Sasaran ke 1 **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Adaptif, dan Visioner**. Untuk mencapai Misi ke 4, tujuan ke 4 dan sasaran ke 1 dapat dicascadingkan menjadi satu Tujuan Bappeda Kabupaten Kutai Timur yaitu :

"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel"

Tujuan ini merupakan komitmen utama Bappeda Kabupaten Kutai Timur untuk menghasilkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dapat di pertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan memperhatikan :

- a. Akuntabilitas Teknis : Perencanaan disusun dengan metode yang benar, berbasis data, analisis dan proyeksi yang valid serta menggunakan instrumen perencanaan yang standar;
- b. Akuntabilitas Administrasi : proses perencanaan sesuai dengan perundang-undangan dan dokumen perencanaan lengkap serta tertib;
- c. Akuntabilitas Kinerja : perencanaan yang disusun dapat diukur capaiannya, target-target yang di tetapkan realistis dan terukur, sistem monitoring evaluasi berjalan dengan baik;

- d. Akuntabilitas Publik : Transparan dan dapat diakses oleh masyarakat, responsif terhadap kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.

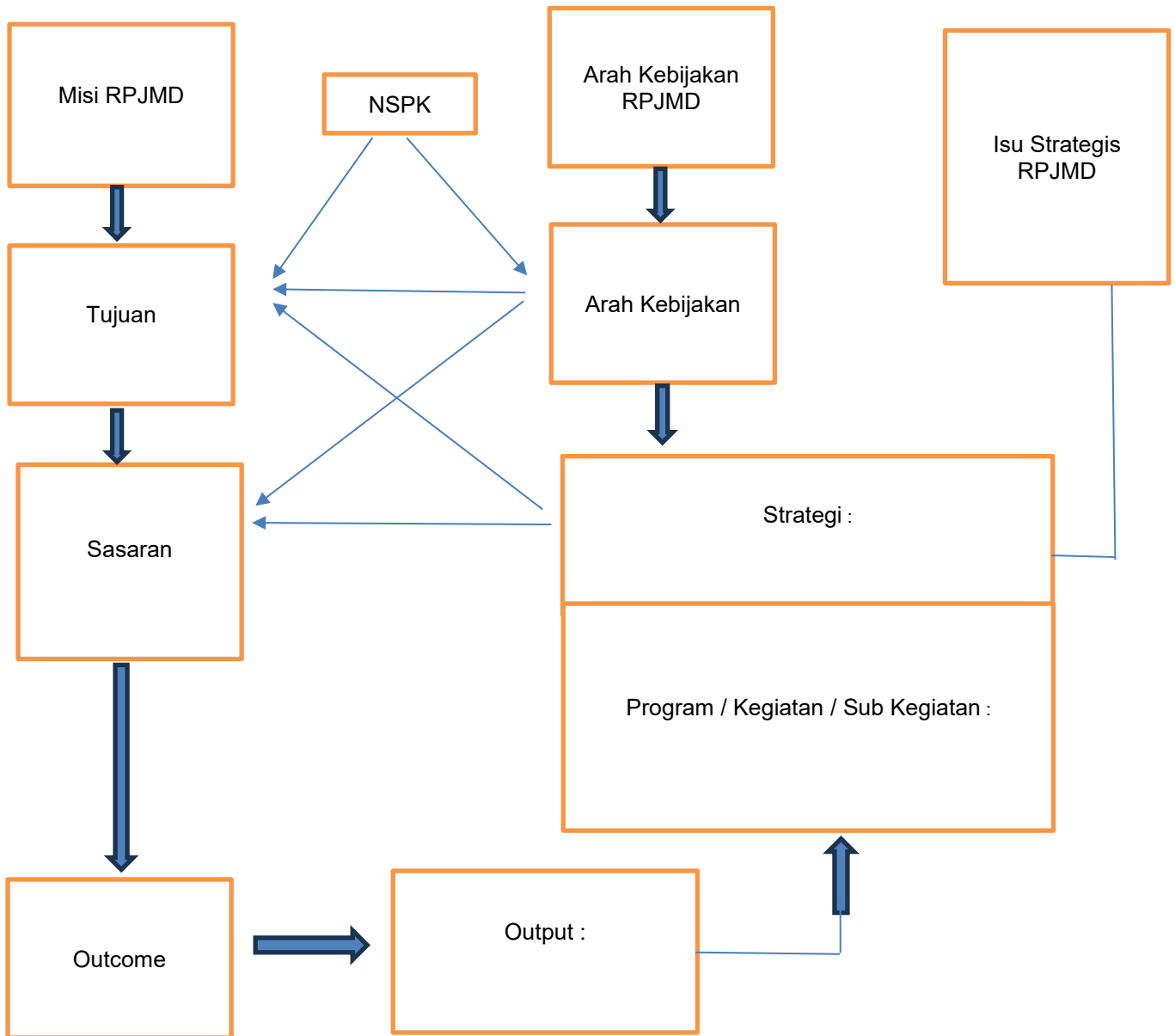
3.2 Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional dan untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan tujuan dan indikator kinerja tujuan Bappeda sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan. Sasaran Jangka Menengah Bappeda sebagai berikut :

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berorientasi pada Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah”

Sasaran ini merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang lebih spesifik dan fokus pada orientasi kinerja untuk mencapai target tujuan Bappeda. Berorientasi pada pencapaian kinerja pembangunan daerah bermakna bahwa perencanaan pembangunan tidak sekedar formalitas dokumen akan tetapi menghasilkan program pembangunan daerah yang jelas berdampak kepada masyarakat dan memberikan kontribusi nyata pada capaian pembangunan daerah.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur



Keterkaitan antara sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur dengan tujuan Renstra penting untuk memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah (makro) dengan pelaksanaan program perangkat daerah (mikro). Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai arah dan tolak ukur capaian kinerja PD selama lima tahun, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel		Nilai Sakip Pemerintah Daerah (Nilai)	60,08	62,24	64,07	67,72	70,28	72,59	74,50	
		Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja pembangunan daerah	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja (Nilai)	20,39	20,49	20,60	21,5	22,00	22,25	23,00	
			Nilai Sakip Komponen Pengukur Kinerja (Nilai)	18,04	18,75	19,47	21,22	22,28	23,34	23,50	

3.3 Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Bappeda merupakan pendekatan utama yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Penyusunan strategi memperhitungkan faktor internal (SDM, kapasitas fiskal, kebijakan daerah, dan potensi unggulan) serta faktor eksternal (kebijakan nasional, ekonomi regional, kondisi sosial, dan tantangan global). Selanjutnya, strategi diterjemahkan ke dalam pentahapan atau prioritas tahunan dan arah kebijakan yang lebih konkret untuk memastikan pembangunan berjalan terarah, sistematis, dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan melalui tahapan Analisa ditentukan strategi Renstra Bappeda sebagai berikut :

a. Peningkatan Sistem Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Berbasis Kinerja;

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan seluruh sistem perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan integrasi, sinkronisasi, dan digitalisasi dalam seluruh siklus perencanaan (planning), pemantauan (monitoring), penilaian (evaluasi), dan pertanggungjawaban (pelaporan) yang berorientasi pada pencapaian kinerja pembangunan yang terukur.

b. Pengembangan Kapasitas SDM dalam bidang Perencanaan;

Strategi ini difokuskan pada peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas sumber daya manusia perencana dalam menjalankan fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah, serta membangun budaya akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam setiap tahapan proses pembangunan.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Standardisasi Sistem Perencanaan Berbasis Kinerja	Peningkatan Implementasi Menyeluruh Perencanaan Berbasis Kinerja Di Seluruh PD	Optimalisasi Kualitas Perencanaan Dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Integrasi Dan Keberlanjutan Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan	Pembudayaan Perencanaan Berorientasi Kinerja Yang Berkelanjutan Dan Akuntabel

Pelaksanaan Renstra Bappeda tahun 2025-2029 disusun secara bertahap dengan tema yang jelas dan terukur untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda. Setiap tahapan memiliki fokus yang berbeda namun saling terkait dan berkesinambungan, dimulai dari penguatan standardisasi di tahun pertama, implementasi menyeluruh di tahun kedua, optimalisasi kualitas di tahun ketiga, integrasi sistem di tahun keempat, hingga pembudayaan di tahun kelima. Pola progresif ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Renstra Bappeda tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi sistem perencanaan berbasis kinerja yang kokoh dan membudayakan perencanaan berorientasi kinerja yang berkelanjutan serta akuntabel di seluruh organisasi perangkat daerah.

Tahun Pertama : Penguatan Standardisasi Sistem Perencanaan Berbasis Kinerja

- a. Standardisasi Sistem Data dan Informasi Perencanaan : pemetaan dan inventarisasi seluruh sumber data pembangunan daerah, serta penyusunan indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Tujuannya adalah memastikan setiap dokumen perencanaan memiliki basis data yang akurat dan terstandar untuk mendukung analisis kebutuhan daerah.
- b. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Perencanaan : Bappeda menitikberatkan pada peningkatan kompetensi ASN dalam bidang perencanaan berbasis data, penyusunan SOP dan pedoman teknis perencanaan terintegrasi serta reformasi sistem pengelolaan kinerja internal Bappeda. Langkah ini bertujuan untuk membangun SDM perencana yang kompeten dan sistem kelembagaan yang mendukung perencanaan berbasis kinerja.
- c. Sinkronisasi dan Standardisasi Dokumen Perencanaan : evaluasi komprehensif terhadap dokumen perencanaan yang ada, penyusunan template perencanaan yang terstandar, dan pembangunan mekanisme sinkronisasi perencanaan vertikal dan horizontal. Dengan demikian, seluruh PD dapat menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan visi pembangunan daerah.
- d. Pelatihan Dasar Perencanaan Berbasis Kinerja untuk Seluruh PD : Mencakup penyeragaman pemahaman tentang perencanaan berbasis kinerja di semua PD, pelatihan penggunaan SOP dan template yang telah distandarkan, serta pembentukan tim perencanaan di setiap PD. Hal ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan secara menyeluruh di daerah.

Dengan fokus-fokus tersebut, Bappeda menegaskan arah pembangunan yang terintegrasi: membangun sistem perencanaan yang terstandar, memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan, serta memastikan keselarasan dokumen perencanaan dengan visi pembangunan daerah.

Tahun Kedua : Peningkatan Implementasi Menyeluruh Perencanaan Berbasis Kinerja Di Seluruh PD

- a. Operasionalisasi Satu Data Perencanaan di Seluruh PD : penerapan sistem Satu Data di seluruh PD, verifikasi dan validasi data perencanaan secara berkala, serta integrasi database perencanaan PD. Tujuannya adalah memastikan setiap PD menggunakan sistem data yang sama untuk mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
- b. Penguatan Mekanisme Koordinasi dan Integrasi Perencanaan Antar PD : Bappeda menitikberatkan pada peningkatan implementasi forum koordinasi perencanaan multistakeholder secara rutin, pendampingan intensif kepada seluruh PD, serta pembangunan mekanisme kolaborasi perencanaan yang efektif. Langkah ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi perencanaan vertikal dan horizontal berjalan optimal.
- c. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Berbasis Data : Fokus ini meliputi pengembangan aplikasi monitoring evaluasi kinerja pembangunan daerah yang terintegrasi, peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi triwulanan berbasis data, serta penyusunan sistem reward and punishment berbasis kinerja untuk perangkat daerah. Dengan demikian, pencapaian kinerja pembangunan dapat dipantau secara real-time dan akurat.
- d. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Terintegrasi : fasilitasi akses data perencanaan bagi seluruh PD, dan penerapan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perencanaan pembangunan daerah.

Dengan fokus-fokus tersebut, Bappeda menegaskan arah pembangunan yang terintegrasi: ekspansi penerapan sistem ke seluruh PD, penguatan koordinasi dan integrasi antar PD, serta pembangunan infrastruktur digital untuk mendukung perencanaan berbasis kinerja yang efektif dan efisien.

Tahun Ketiga : Optimalisasi Kualitas Perencanaan Dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan

- a. Penguatan Kualitas Substansi Perencanaan Berbasis Bukti : mencakup evaluasi mendalam terhadap dokumen perencanaan yang telah, implementasi sistem perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning), serta peningkatan kualitas analisis dalam dokumen perencanaan (bukan hanya aspek prosedural). Tujuannya adalah memastikan setiap dokumen perencanaan memiliki substansi yang berkualitas tinggi dan didukung oleh data dan analisis yang kuat.
- b. Penguatan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan : peningkatan sistem transparansi perencanaan berbasis teknologi informasi, pembangunan mekanisme akuntabilitas yang lebih ketat dengan sistem reward and punishment yang jelas, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang berkualitas. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan pencapaian kerjanya sesuai target yang ditetapkan.
- c. Peningkatan Partisipasi dan Kolaborasi Stakeholder dalam Perencanaan : perluasan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan melalui Musrenbang digital, pengembangan mekanisme inovasi perencanaan partisipatif. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan didukung oleh berbagai pihak.
- d. Optimalisasi Sistem Monitoring dan Evaluasi : mencakup penerapan sistem monitoring evaluasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi, peningkatan kapasitas PD dalam melakukan self-assessment kinerja, dan pengembangan mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi yang efektif. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas implementasi program dan memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan fokus-fokus tersebut, Bappeda menegaskan arah pembangunan yang terintegrasi: meningkatkan kualitas substansi perencanaan berbasis bukti, memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan, serta mengoptimalkan partisipasi dan kolaborasi stakeholder untuk memastikan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel.

Tahun Keempat : Integrasi Dan Keberlanjutan Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan

- a. Integrasi Penuh Siklus Perencanaan-Penganggaran-Pelaksanaan-Evaluasi : Fokus ini mencakup pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi satu siklus manajemen kinerja yang utuh, implementasi artificial intelligence untuk analisis data pembangunan, serta digitalisasi seluruh proses perencanaan (paperless planning). Tujuannya adalah memastikan sistem berjalan otomatis dan efisien tanpa tergantung intervensi manual yang berlebihan.
- b. Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kinerja : pengembangan dashboard kinerja real-time untuk pengambilan keputusan cepat, penerapan sistem perencanaan berbasis risiko (risk-based planning). Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan kinerja sebelum berdampak signifikan terhadap pencapaian target pembangunan.
- c. Inovasi Metodologi Perencanaan yang Adaptif dan Responsif : pengembangan model perencanaan adaptif yang responsif terhadap perubahan dinamis, penerapan best practice perencanaan melalui benchmarking dengan daerah lain, serta pengembangan sistem perencanaan yang fleksibel namun tetap akuntabel. Dengan demikian, sistem perencanaan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis tanpa kehilangan fokus pada pencapaian kinerja.
- d. Penguatan Keberlanjutan Sistem Melalui Regenerasi : Mencakup penyusunan mekanisme sustainability sistem perencanaan (regenerasi SDM, update sistem berkala), pemberian kemudahan akses informasi perencanaan publik secara digital. Hal ini bertujuan memastikan sistem manajemen kinerja dapat berjalan berkelanjutan tanpa terganggu oleh dinamika organisasi.

Dengan fokus-fokus tersebut, Bappeda menegaskan arah pembangunan yang terintegrasi: mengintegrasikan seluruh siklus manajemen kinerja menjadi satu kesatuan, memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap masalah kinerja, serta memastikan keberlanjutan sistem melalui inovasi, otomasi, dan regenerasi SDM.

Tahun Kelima : Pembudayaan Perencanaan Berorientasi Kinerja Yang Berkelanjutan Dan Akuntabel

- a. Institutionalisasi Perencanaan Berbasis Kinerja sebagai Budaya Kerja : pembudayaan perencanaan berbasis kinerja sebagai "the way we work" di

seluruh PD, penguatan nilai-nilai kinerja dalam setiap aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendorong orientasi pada hasil dan akuntabilitas. Tujuannya adalah menjadikan perencanaan berbasis kinerja bukan lagi sebagai program, tetapi sebagai bagian integral dari budaya organisasi.

- b. Pengembangan Leadership dan Ownership di Setiap Level Organisasi : penguatan kepemimpinan yang berorientasi kinerja di semua tingkatan, pembangunan sense of ownership terhadap pencapaian target kinerja di setiap PD, serta pengembangan sistem reward yang mengapresiasi inovasi dan pencapaian kinerja. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap pimpinan dan pegawai memiliki komitmen kuat terhadap pencapaian kinerja pembangunan.
- c. Penciptaan Learning Organization yang Inovatif dan Berkelanjutan : membangun organisasi pembelajar yang terus berinovasi dalam perencanaan, transfer knowledge untuk regenerasi aparatur di bidang perencanaan jangka menengah, serta penguatan jaringan dan kemitraan dengan perencana profesional (mendorong keanggotaan PPPI). Dengan demikian, kapasitas perencanaan daerah dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan masa depan.
- d. Konsolidasi dan Evaluasi Komprehensif untuk Keberlanjutan Jangka Panjang Mencakup evaluasi komprehensif pencapaian RPJMD 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029, penyempurnaan seluruh sistem dan mekanisme yang telah dibangun, serta penyusunan roadmap pembangunan untuk memastikan sistem tetap berjalan meski terjadi pergantian pimpinan atau personel. Output Kunci: Budaya organisasi yang berorientasi kinerja yang telah mengakar, leadership yang kuat di setiap level, learning organization yang terus berinovasi, sistem perencanaan yang resilient terhadap perubahan, dan blueprint untuk pengembangan sistem perencanaan periode berikutnya.

Dengan fokus-fokus tersebut, Bappeda menegaskan arah pembangunan yang terintegrasi : menjadikan perencanaan berbasis kinerja sebagai budaya organisasi yang mengakar, memperkuat kepemimpinan dan ownership di setiap level, menciptakan organisasi pembelajar yang inovatif, serta memastikan keberlanjutan sistem untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah secara berkelanjutan dan akuntabel.

3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran secara bertahap selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar terfokus dan sesuai pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema tahunan selama periode Renstra dirancang berkesinambungan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD. Berikut arah kebijakan Bappeda yang sinkron dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029

OPERASIONALISASI NSPK PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka</p>	<p>Meningkatkan kapasitas perencanaan daerah dengan memperkuat analisis kebutuhan daerah serta memastikan penganggaran berbasis kinerja yang selaras dengan visi pembangunan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan implementasi Satu Data Indonesia Kabupaten Kutai Timur untuk mendukung perencanaan berbasis Kinerja dan bukti (evidence) b. Menggunakan hasil monev sebagai salah satu dasar untuk penyusunan dokumen selanjutnya c. Mewujudkan sistem perencanaan berbasis kinerja yang berkualitas d. Memperkuat kolaborasi dan kerjasama pembangunan horisontal dan vertikal e. Peningkatan sinkronisasi dan sinergitas antar dokumen perencanaan vertikal dan horizontal f. Mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan 	

OPERASIONALISASI NSPK PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah			
	Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pencapaian program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.	a. Mengoptimalkan sistem monitoring evaluasi kinerja pembangunan berbasis Kinerja dan bukti (evidence)	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

4.1. Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Bappeda Kabupaten Kutai Timur ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program adalah sebagai berikut :

a. **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Merupakan memiliki peran krusial dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan efisien. Program ini mencakup serangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari penyusunan rencana pembangunan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaannya, hingga evaluasi hasil Pembangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

c. **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan berbagai rencana pembangunan

di tingkat daerah agar berjalan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Memastikan adanya keselarasan antara rencana pembangunan dari berbagai bidang (misalnya, pemerintahan, ekonomi, infrastruktur) dan antar tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan menyesuaikan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional, serta memastikan bahwa program-program pembangunan daerah saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

4.2. Uraian Kegiatan

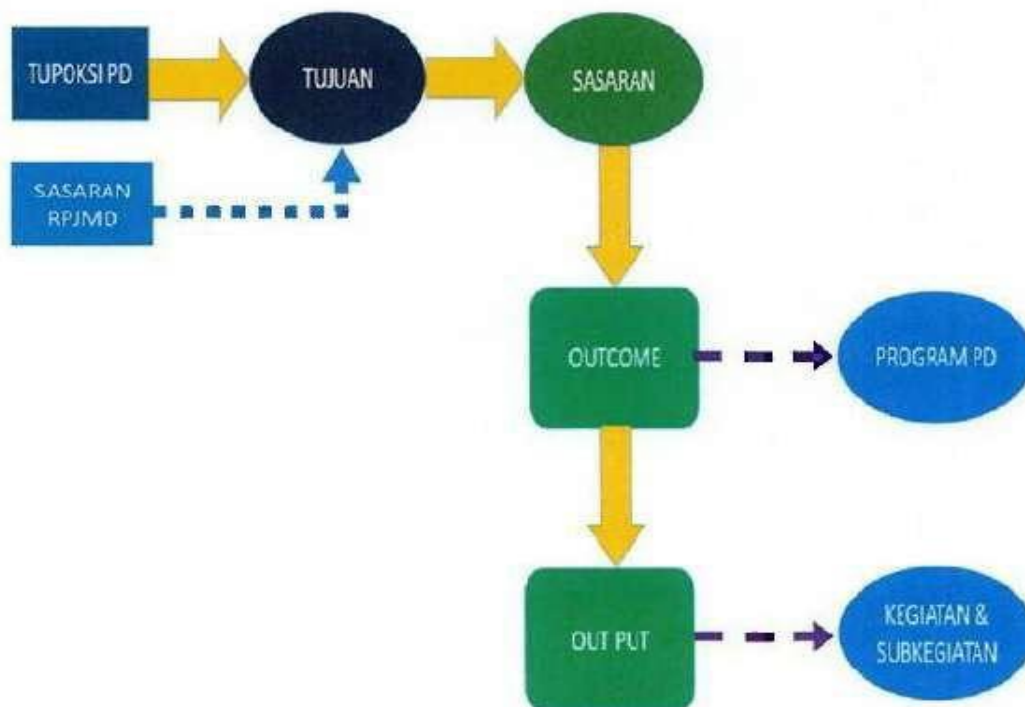
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Bappeda Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
10. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
13. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
14. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

15. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur



Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel	Tenwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja pembangunan daerah	Terlaksananya penunjang perangkat daerah		Nilai Sakip Pemerintah Daerah (Nilai)		
					Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja (Nilai)		
					Nilai Sakip Komponen Pengukur Kinerja (Nilai)		
					Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SAKIP (Nilai)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Penyusunan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Persentase Capaian Kinerja Program (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Kutai Timur	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
				MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN, BIDANG	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			PEREKONOMIAN DAN SDA		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				37.661.022.779,00		39.225.450.407,00		40.868.099.415,00		42.592.880.875,00		44.403.901.407,00		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.089.449.935,00		21.965.499.381,00		22.885.351.298,00		23.851.195.812,00		24.865.332.551,00		
Terlaksananya penunjang perangkat daerah	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	74,00	76,00	21.089.449.935,00	77,00	21.965.499.381,00	78,00	22.885.351.298,00	79,00	23.851.195.812,00	80,00	24.865.332.551,00	5.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	70,50		72,00		73,50		75,00		76,50			
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				647.566.273,00		718.940.373,00		750.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	647.566.273,00	1	718.940.373,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	850.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	5		5		5		5					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	8		7		7		7		7			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				297.566.273,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	8	297.566.273,00	7	300.000.000,00	7	300.000.000,00	7	300.000.000,00	7	350.000.000,00		
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	250.000.000,00		
5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		68.940.373,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	68.940.373,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.941.883.662,00		14.596.559.008,00		15.272.421.368,00		15.845.318.223,00		16.541.130.952,00		
Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	72	90	13.941.883.662,00	90	14.596.559.008,00	90	15.272.421.368,00	90	15.845.318.223,00	90	16.541.130.952,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66	106		106		106		106		106			
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.241.883.662,00		13.771.559.008,00		14.322.421.368,00		14.895.318.223,00		15.491.130.952,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66	106	13.241.883.662,00	106	13.771.559.008,00	106	14.322.421.368,00	106	14.895.318.223,00	106	15.491.130.952,00		
5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				500.000.000,00		525.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	72	90	500.000.000,00	90	525.000.000,00	90	600.000.000,00	90	600.000.000,00	90	650.000.000,00		
5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				200.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	200.000.000,00	5	300.000.000,00	5	350.000.000,00	5	350.000.000,00	5	400.000.000,00		
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	0	0,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	0	0,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0,00	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	79	0		110		110		110		110			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0		10		10		10		10			
5.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00		
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	79	0	0,00	110	500.000.000,00	110	500.000.000,00	110	500.000.000,00	110	500.000.000,00		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.200.000.000,00		1.400.000.000,00		1.612.929.930,00		1.612.929.930,00		1.712.929.930,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyusunan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	100	2.200.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.612.929.930,00	100	1.612.929.930,00	100	1.712.929.930,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	20		20		20		20		20			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				900.000.000,00		400.000.000,00		512.929.930,00		512.929.930,00		512.929.930,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	20	900.000.000,00	20	400.000.000,00	20	512.929.930,00	20	512.929.930,00	20	512.929.930,00		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.200.000.000,00		900.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	100	1.200.000.000,00	100	900.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.100.000.000,00		
5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00		
5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		2.292.947.659,00		2.411.271.669,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	52	52	1.900.000.000,00	52	1.900.000.000,00	52	1.900.000.000,00	52	2.292.947.659,00	52	2.411.271.669,00		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	150		150		150		150		150			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		892.947.659,00		892.947.659,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	52	52	700.000.000,00	52	700.000.000,00	52	700.000.000,00	52	892.947.659,00	52	892.947.659,00		
5.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.400.000.000,00		1.518.324.010,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	150	1.200.000.000,00	150	1.200.000.000,00	150	1.200.000.000,00	150	1.400.000.000,00	150	1.518.324.010,00		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				6.892.176.798,00		7.178.475.762,00		7.479.089.674,00		7.794.734.282,00		8.126.161.120,00		
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program (Persentase)	93,47	94,50	6.892.176.798,00	95,00	7.178.475.762,00	95,50	7.479.089.674,00	96,00	7.794.734.282,00	96,50	8.126.161.120,00	5.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	99,32	100		100		100		100		100			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				4.812.176.798,00		5.098.475.762,00		5.098.475.762,00		5.414.120.370,00		5.745.547.208,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	3	4.812.176.798,00	3	5.098.475.762,00	3	5.098.475.762,00	3	5.414.120.370,00	4	5.745.547.208,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	0		1		1		1		2			
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1		1		1		1		2			
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1		1		1		1		2			
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	2.820	2.820		2.820		2.820		2.820		2.820			
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	2	900.000.000,00		
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	2.820	2.820	300.000.000,00	2.820	300.000.000,00	2.820	300.000.000,00	2.820	300.000.000,00	2.820	400.000.000,00		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				3.412.176.798,00		3.498.475.762,00		3.498.475.762,00		3.814.120.370,00		3.945.547.208,00		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	3	3.412.176.798,00	3	3.498.475.762,00	3	3.498.475.762,00	3	3.814.120.370,00	4	3.945.547.208,00		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				700.000.000,00		700.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Kutai Timur	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	222	110	700.000.000,00	110	700.000.000,00	110	900.000.000,00	110	900.000.000,00	110	900.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2	2		2		2		2		3			
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	3	500.000.000,00		
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				300.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	222	110	300.000.000,00	110	300.000.000,00	110	400.000.000,00	110	400.000.000,00	110	400.000.000,00		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				1.380.000.000,00		900.000.000,00		980.613.912,00		980.613.912,00		980.613.912,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5	5	1.380.000.000,00	5	900.000.000,00	5	980.613.912,00	5	980.613.912,00	5	980.613.912,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5	1		1		1		1		1			
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				680.000.000,00		400.000.000,00		480.613.912,00		480.613.912,00		480.613.912,00		
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5	5	680.000.000,00	5	400.000.000,00	5	480.613.912,00	5	480.613.912,00	5	480.613.912,00		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				700.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5	1	700.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				0,00		480.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0,00	1	480.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0,00		480.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0,00	1	480.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				9.679.396.046,00		10.081.475.264,00		10.503.658.443,00		10.946.950.781,00		11.412.407.736,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN, BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	9.679.396.046,00	100	10.081.475.264,00	100	10.503.658.443,00	100	10.946.950.781,00	100	11.412.407.736,00	5.01.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100		100		100		100		100			
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				3.226.465.350,00		3.360.491.756,00		3.501.219.483,00		3.648.983.597,00		3.804.135.916,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	9	3.226.465.350,00	2	3.360.491.756,00	2	3.501.219.483,00	2	3.648.983.597,00	3	3.804.135.916,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	0		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	0		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	0		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	0		2		2		2		3			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	0		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	12		5		4		4		6			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.067.140.566,00		517.140.566,00		517.140.567,00		591.022.625,00		591.022.625,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	9	1.067.140.566,00	2	517.140.566,00	2	517.140.567,00	2	591.022.625,00	3	591.022.625,00		
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	0	0,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	0	0,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00		
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	0	0,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2.159.324.784,00		743.351.190,00		884.078.916,00		957.960.972,00		1.113.113.291,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	12	2.159.324.784,00	5	743.351.190,00	4	884.078.916,00	4	957.960.972,00	6	1.113.113.291,00		
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	0	0,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	0	0,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	0	0,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				3.226.465.348,00		3.360.491.754,00		3.501.219.480,00		3.648.983.592,00		3.804.135.910,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	3.226.465.348,00	2	3.360.491.754,00	2	3.501.219.480,00	2	3.648.983.592,00	3	3.804.135.910,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan (Laporan)	2	2		2		2		2		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2		2		2		2		3			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				626.465.348,00		760.491.754,00		851.219.480,00		925.101.536,00		1.080.253.854,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	626.465.348,00	2	760.491.754,00	2	851.219.480,00	2	925.101.536,00	3	1.080.253.854,00		
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPDP/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/ RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		623.882.056,00		623.882.056,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	550.000.000,00	2	623.882.056,00	3	623.882.056,00		
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00		
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				3.226.465.348,00		3.360.491.754,00		3.501.219.480,00		3.648.983.592,00		3.804.135.910,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	3.226.465.348,00	2	3.360.491.754,00	2	3.501.219.480,00	2	3.648.983.592,00	3	3.804.135.910,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2		2		2		2		3			
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				626.465.348,00		760.491.754,00		851.219.480,00		925.101.536,00		1.080.253.854,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	626.465.348,00	2	760.491.754,00	2	851.219.480,00	2	925.101.536,00	3	1.080.253.854,00		
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertindakannya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00		
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00		
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		623.882.056,00		623.882.056,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	550.000.000,00	2	623.882.056,00	3	623.882.056,00		
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00		
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		

4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
1,	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
2,	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN, BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	

NO	PROGRAM PRIORITYAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	

NO	PROGRAM PRIORITYAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	

4.5. Target Keberhasilan Pencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda
 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis

perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
2.	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Nilai	60,08	62,24	64,07	67,72	70,28	72,59	74,50	
3.	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	20,39	20,49	20,60	21,5	22,00	22,25	23,00	
4.	Nilai Sakip Komponen Pengukur Kinerja	Nilai	18,04	18,75	19,47	21,22	22,28	23,34	23,50	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK), IKK merupakan indikator yang secara langsung mencerminkan kinerja dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Indikator Kinerja Kunci memiliki peran penting dalam menjabarkan dan mengukur kontribusi teknis program terhadap tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, menjadi dasar penyusunan target kinerja tahunan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan perjanjian kinerja, memberikan arah yang jelas dalam proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Indikator-indikator kunci tersebut dipantau secara berkala dan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja tahunan serta dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan di tahun-tahun berikutnya. Dengan adanya Indikator Kinerja Kunci, perangkat daerah dapat memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, hasil yang dapat diukur, serta berkontribusi

nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun Indikator Kinerja Kunci Bappeda Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	5.01 – PERENCANAAN										
1.	Persentase Capaian Kinerja Program	positif	Persentase	93,47	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	
2.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	positif	%	99,32	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029. Penetapan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Penyusunan Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi ASN Bappeda Kabupaten Kutai Timur dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bappeda dibidang perencanaan serta menjadi pedoman pelaksanaan pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini diharapkan dapat memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Selanjutnya, dengan tersusunnya Renstra ini, akan dipergunakan untuk :

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis.
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPd.
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Disamping itu, penyusunan Renstra dapat menjadi bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda serta dapat juga memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Kutai Timur untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Renstra . Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam melaksanakan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 2029 secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas** : Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. **Partisipatif** : Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. **Efisiensi dan Efektivitas** : Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. **Berkelanjutan** : Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian seluruh indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta melakukan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi yang diperoleh.
2. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Perangkat Daerah lain, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan pihak-pihak terkait dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional.
3. **Pelibatan Masyarakat** : melalui forum musyawarah, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. **Audit Internal dan Eksternal** : Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.



Sangatta, 29 Oktober 2025

Dif. Kepala Badan,

Novari Noor, S.T., M.T.

NIP. 19671108 200212 1 004

LAMPIRAN

**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.01 - PERENCANAAN				37.661.022.779,00		39.225.450.407,00		40.868.099.415,00		42.592.880.875,00		44.403.901.407,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.089.449.935,00		21.965.499.381,00		22.885.351.298,00		23.851.195.812,00		24.865.332.551,00	
Terlaksananya penunjang perangkat daerah	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	74,00	76,00	21.089.449.935,00	77,00	21.965.499.381,00	78,00	22.885.351.298,00	79,00	23.851.195.812,00	80,00	24.865.332.551,00	
	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	70,50		72,00		73,50		75,00		76,50		
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	647.566.273,00	6 Dokumen	718.940.373,00	6 Dokumen	750.000.000,00	6 Dokumen	750.000.000,00	7 Dokumen	850.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	647.566.273,00	1	718.940.373,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	850.000.000,00	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	5		5		5		5				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	8		7		7		7				
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				297.566.273,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	8	297.566.273,00	7	300.000.000,00	7	300.000.000,00	7	300.000.000,00	7	350.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	250.000.000,00	
5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		68.940.373,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	68.940.373,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		1 Laporan	13.941.883.662,00	1 Laporan	14.596.559.008,00	1 Laporan	15.272.421.368,00	1 Laporan	15.845.318.223,00	1 Laporan	16.541.130.952,00	
Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	72	90	13.941.883.662,00	90	14.596.559.008,00	90	15.272.421.368,00	90	15.845.318.223,00	90	16.541.130.952,00	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66	106		106		106		106		106		
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.241.883.662,00		13.771.559.008,00		14.322.421.368,00		14.895.318.223,00		15.491.130.952,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66	106	13.241.883.662,00	106	13.771.559.008,00	106	14.322.421.368,00	106	14.895.318.223,00	106	15.491.130.952,00	
5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				500.000.000,00		525.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	72	90	500.000.000,00	90	525.000.000,00	90	600.000.000,00	90	600.000.000,00	90	650.000.000,00	
5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				200.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	200.000.000,00	5	300.000.000,00	5	350.000.000,00	5	350.000.000,00	5	400.000.000,00	
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		0 Laporan	0,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	
Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	0	0,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	0	0,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	850.000.000,00	1 Dokumen	850.000.000,00	1 Dokumen	850.000.000,00	1 Dokumen	850.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0,00	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	79	0		110		110		110		110		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0		10		10		10		10		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	79	0	0,00	110	500.000.000,00	110	500.000.000,00	110	500.000.000,00	110	500.000.000,00	
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Laporan	2.200.000.000,00	1 Laporan	1.400.000.000,00	1 Laporan	1.612.929.930,00	1 Laporan	1.612.929.930,00	1 Laporan	1.712.929.930,00	
Terlaksananya Penyusunan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	100	2.200.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.612.929.930,00	100	1.612.929.930,00	100	1.712.929.930,00	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	20		20		20		20		20		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2		
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				900.000.000,00		400.000.000,00		512.929.930,00		512.929.930,00		512.929.930,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	20	900.000.000,00	20	400.000.000,00	20	512.929.930,00	20	512.929.930,00	20	512.929.930,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.200.000.000,00		900.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	100	1.200.000.000,00	100	900.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.100.000.000,00	
5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		6 Unit	1.500.000.000,00	6 Unit	1.500.000.000,00	6 Unit	1.500.000.000,00	6 Unit	1.500.000.000,00	6 Unit	1.500.000.000,00	
5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00	6	1.500.000.000,00	
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		1 Laporan	900.000.000,00	1 Laporan	900.000.000,00	1 Laporan	900.000.000,00	1 Laporan	900.000.000,00	1 Laporan	900.000.000,00	
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	12	500.000.000,00	
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara		202 Unit	1.900.000.000,00	202 Unit	1.900.000.000,00	202 Unit	1.900.000.000,00	202 Unit	2.292.947.659,00	202 Unit	2.411.271.669,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	52	52	1.900.000.000,00	52	1.900.000.000,00	52	1.900.000.000,00	52	2.292.947.659,00	52	2.411.271.669,00	
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	150		150		150		150		150		
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		892.947.659,00		892.947.659,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	52	52	700.000.000,00	52	700.000.000,00	52	700.000.000,00	52	892.947.659,00	52	892.947.659,00	
5.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.400.000.000,00		1.518.324.010,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	150	1.200.000.000,00	150	1.200.000.000,00	150	1.200.000.000,00	150	1.400.000.000,00	150	1.518.324.010,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				6.892.176.798,00		7.178.475.762,00		7.479.089.674,00		7.794.734.282,00		8.126.161.120,00	
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program (Persentase)	93,47	94,50	6.892.176.798,00	95,00	7.178.475.762,00	95,50	7.479.089.674,00	96,00	7.794.734.282,00	96,50	8.126.161.120,00	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPMD (%)	99,32	100		100		100		100		100		
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu		2 Dokumen	4.812.176.798,00	2 Dokumen	5.098.475.762,00	2 Dokumen	5.098.475.762,00	2 Dokumen	5.414.120.370,00	3 Dokumen	5.745.547.208,00	
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	3	4.812.176.798,00	3	5.098.475.762,00	3	5.098.475.762,00	3	5.414.120.370,00	4	5.745.547.208,00	
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	0		1		1		1		2		
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1		1		1		1		2		
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1		1		1		1		2		
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	2.820	2.820		2.820		2.820		2.820		2.820		
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	2	300.000.000,00	
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	2	200.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00	
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	2	900.000.000,00	
5.01.02.2.01.0006 - Penyediaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00	
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	2.820	2.820	300.000.000,00	2.820	300.000.000,00	2.820	300.000.000,00	2.820	300.000.000,00	2.820	400.000.000,00	
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				3.412.176.798,00		3.498.475.762,00		3.498.475.762,00		3.814.120.370,00		3.945.547.208,00	
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	3	3.412.176.798,00	3	3.498.475.762,00	3	3.498.475.762,00	3	3.814.120.370,00	4	3.945.547.208,00	
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Kutai Timur		1 Dokumen	700.000.000,00	1 Dokumen	700.000.000,00	1 Dokumen	900.000.000,00	1 Dokumen	900.000.000,00	1 Dokumen	900.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Kutai Timur	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	222	110	700.000.000,00	110	700.000.000,00	110	900.000.000,00	110	900.000.000,00	110	900.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2	2		2		2		2		3		
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	3	500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				300.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	222	110	300.000.000,00	110	300.000.000,00	110	400.000.000,00	110	400.000.000,00	110	400.000.000,00	
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu		1 Laporan	1.380.000.000,00	1 Laporan	900.000.000,00	1 Laporan	980.613.912,00	1 Laporan	980.613.912,00	1 Laporan	980.613.912,00	
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5	5	1.380.000.000,00	5	900.000.000,00	5	980.613.912,00	5	980.613.912,00	5	980.613.912,00	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5	1		1		1		1		1		
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				680.000.000,00		400.000.000,00		480.613.912,00		480.613.912,00		480.613.912,00	
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5	5	680.000.000,00	5	400.000.000,00	5	480.613.912,00	5	480.613.912,00	5	480.613.912,00	
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan				700.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5	1	700.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang		1 Laporan	0,00	1 Laporan	480.000.000,00	1 Laporan	500.000.000,00	1 Laporan	500.000.000,00	1 Laporan	500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1	0	0,00	1	480.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0,00		480.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1	0	0,00	1	480.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				9.679.396.046,00		10.081.475.264,00		10.503.658.443,00		10.946.950.781,00		11.412.407.736,00	
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN, BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	9.679.396.046,00	100	10.081.475.264,00	100	10.503.658.443,00	100	10.946.950.781,00	100	11.412.407.736,00	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (%)	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100		100		100		100		100		
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		3 Laporan	3.226.465.350,00	3 Laporan	3.360.491.756,00	3 Laporan	3.501.219.483,00	3 Laporan	3.648.983.597,00	4 Laporan	3.804.135.916,00	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	9	3.226.465.350,00	2	3.360.491.756,00	2	3.501.219.483,00	2	3.648.983.597,00	3	3.804.135.916,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET		
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	0		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	0		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	0		2		2		2		2				
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	1	0		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	0		2		2		2		3				
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	2	0		2		2		2		3				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	12		5		4		4		6				
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							1.067.140.566,00		517.140.566,00		517.140.567,00		591.022.625,00		591.022.625,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	9	1.067.140.566,00	2	517.140.566,00	2	517.140.567,00	2	591.022.625,00	3	591.022.625,00	
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	0	0,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	3	300.000.000,00	
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	0	0,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	0	0,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2.159.324.784,00		743.351.190,00		884.078.916,00		957.960.972,00		1.113.113.291,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	12	2.159.324.784,00	5	743.351.190,00	4	884.078.916,00	4	957.960.972,00	6	1.113.113.291,00	
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	2	0	0,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	3	300.000.000,00	
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	1	0	0,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	0	0,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET				
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)		3 Laporan	3.226.465.348,00	3 Laporan	3.360.491.754,00	3 Laporan	3.501.219.480,00	3 Laporan	3.648.983.592,00	4 Laporan	3.804.135.910,00					
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	3.226.465.348,00	2	3.360.491.754,00	2	3.501.219.480,00	2	3.648.983.592,00	3	3.804.135.910,00					
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	1	4										4	4	4		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	2	2										2	2	2	3	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	2	2										2	2	2	3	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2										2	2	2	3	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	1										1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan (Laporan)	1	1										1	1	1	1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1	4		4		4		4		4		
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				626.465.348,00		760.491.754,00		851.219.480,00		925.101.536,00		1.080.253.854,00	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	626.465.348,00	2	760.491.754,00	2	851.219.480,00	2	925.101.536,00	3	1.080.253.854,00	
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	3	300.000.000,00	
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)				500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		623.882.056,00		623.882.056,00	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD) (Dokumen)	3	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	550.000.000,00	2	623.882.056,00	3	623.882.056,00	
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	3	300.000.000,00	
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		3 Laporan	3.226.465.348,00	3 Laporan	3.360.491.754,00	3 Laporan	3.501.219.480,00	3 Laporan	3.648.983.592,00	4 Laporan	3.804.135.910,00	
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	3.226.465.348,00	2	3.360.491.754,00	2	3.501.219.480,00	2	3.648.983.592,00	3	3.804.135.910,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2	2		2		2		2		3		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		623.882.056,00		623.882.056,00	
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	550.000.000,00	2	623.882.056,00	3	623.882.056,00	
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	2	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	3	300.000.000,00	
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	

**DEFINISI OPERASIONAL DAN RUMUS PERHITUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.01 - PERENCANAAN				
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Terlaksananya penunjang perangkat daerah	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	Ukuran statistik yang mengukur kualitas Pegawai ASN berdasarkan empat dimensi utama : kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatannya.	IP ASN = (Kualifikasi x 25%)+ (Kompetensi x 40%) + (Kinerja x 30%) + (Disiplin x 5%)	Ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)
	Nilai SAKIP (Nilai)	Proses sistematis untuk penetapan pengukuran, pengumpulan, klasifikasi, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.	Nilai Sakip = (Perencanaan Kinerja x 30%) + (Pengukuran Kinerja x 30%) + (Pelaporan Kinerja x 15%) + (Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)	Ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Timur
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses untuk mewujudkan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas melalui penyesuaian antara sasaran strategis dengan alokasi anggaran secara efisien serta pengukuran kinerja secara sistematis untuk peningkatan kualitas.		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.		
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Proses pencatatan / penatausahaan BMD		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Proses kegiatan manajemen ASN		
	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan tata kelola yang mendukung fungsi utama suatu organisasi agar berjalan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kegiatan untuk memperoleh BMD yang diperlukan oleh PD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PD agar lingkungan kerja berjalan efektif dan efisien.		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kegiatan untuk mengupayakan agar BMD tetap dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program (Persentase)	Ketercapaian kinerja program seluruh perangkat daerah	$\frac{\text{Total Realisasi Kinerja Program Seluruh PD}}{\text{Total Program Seluruh PD}} \times 100\%$	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	Keselarasn antara jumlah program dalam RKPD dengan jumlah program pada RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD}} \times 100\%$	
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu.			
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Kutai Timur.	Kegiatan analisis data dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu.	Proses sistematis untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana, mencapai target dan menggunakan sumber daya secara efisien.		
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.	Kegiatan untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan dan mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang akurat dan terkini.		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN, BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	Keselarasn program, kegiatan dan indikator kinerja antara dokumen Renja PD dan dokumen RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	$\frac{\text{Jumlah Program dalam Renja PD dibawah koordinasi Bidang PPM}}{\text{Jumlah Program dalam RKPD dibawah koordinasi Bidang PPM}} \times 100\%$	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (%)	Keselarasn program, kegiatan dan indikator kinerja antara dokumen Renja PD dan dokumen RKPD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan.	$\frac{\text{Jumlah Program dalam Renja PD dibawah koordinasi Bidang Infrastwil}}{\text{Jumlah Program dalam RKPD dibawah koordinasi Bidang Bidang Infrastwil}} \times 100\%$	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	Keselarasn program, kegiatan dan indikator kinerja antara dokumen Renja PD dan dokumen RKPD pada Bidang Perekonomian dan SDA.	$\frac{\text{Jumlah Program dalam Renja PD dibawah koordinasi Bidang SDA}}{\text{Jumlah Program dalam RKPD dibawah koordinasi Bidang Bidang SDA}} \times 100\%$	
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	Proses terkoordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (PD, Akademisi, masyarakat) untuk memastikan sinergi, harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berfokus pada aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup manusia (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan).		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).	Proses terkoordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (PD, Akademisi, masyarakat) untuk memastikan sinergi, harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berfokus pada aspek ekonomi dan pengelolaan SDA secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan.		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	Proses terkoordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (PD, Akademisi, masyarakat) untuk memastikan sinergi, harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah secara efektif dan efisien.		

POHON KINERJA BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Tujuan : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel
Nilai Sakip Pemerintah Daerah

Sasaran : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja pembangunan daerah
1. Nilai Sakip Komponen Perencanaan
2. Nilai Sakip Komponen Pengukur

Terlaksananya penunjang perangkat daerah
1. Indeks Profesionalisme ASN
2. Nilai SAKIP

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun Tepat Waktu
Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun

Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian

Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Terlaksananya Penyusunan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah

Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Persentase Capaian Kinerja Program
2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu

Terlaksananya Konsultasi Publik
Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik

Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota
Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota

Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan
Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan

Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Kutai Timur
Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Kutai Timur

Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)

Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi

Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu

Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
Jumlah Laporan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA
1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan

Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian

Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Jumlah Laporan Bahan Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan